CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

BERSATU MELAWAN KORUPSI MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH CERAH

Reza Maulana[1], Dinda Kumala Sari[2] , T. Nurul Amalia[3] , Fadhila Alya Zhafirah[4], Salsabila Ajeng Pangesti[5] , Nanda Ramadhani[6] , Reza Alfadzhira[7]
[1,2,3,4,5,6,7] Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru
e-mail : tn.ejak2005@gmail.com

Abstrak

Untuk mencegah dan menangani korupsi, semua pihak harus bekerja sama. Studi literatur mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa mengatasi korupsi tidak hanya memerlukan tindakan hukum yang represif atau kuratif. Untuk mencegah korupsi sejak dini dan mengurangi efeknya di masa depan, dibutuhkan strategi jangka panjang melalui pendidikan. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan berbagai bahan pendidikan. Studi ini menemukan bahwa kurikulum terintegrasi membantu siswa memahami bagaimana korupsi dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi. Mereka juga belajar tentang peran mereka dalam mencegah dan melawan korupsi. Kolaborasi aktif antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat membuat lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan antikorupsi.
Kata Kunci: Pendidikan, Anti Korupsi

Abstract

To prevent and deal with corruption, all parties must work together. The literature study collected and analyzed data from various sources, including books, scientific journals and relevant articles. Research shows that tackling corruption does not only require repressive or curative legal action. To prevent corruption early on and mitigate its effects in the future, a long-term strategy through education is needed. To support the implementation of anti-corruption education in higher education institutions, the Corruption Eradication Commission (KPK) has provided various educational materials. The study found that an integrated curriculum helps students understand how corruption can undermine social and economic order. They also learn about their role in preventing and fighting corruption.
Active collaboration between the government, educational institutions and society makes it easier to achieve the goals of anti-corruption education.
Keywords: Education, Anti-Corruption

Article History
Received: Januari 2025
Reviewed: Januari 2025
Published: Januari 2025

Plagirism Checker No 931.873.879
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/CAUSA.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan tindakan yang membawa kerugian besar, baik pada tingkat individu, lingkungan, lembaga, maupun dalam skala nasional dan internasional. Berdasarkan data, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 444 kasus korupsi dengan 875 tersangka, yang berpotensi menyebabkan kerugian negara hingga Rp 18,6 triliun. Jumlah tersebut meningkat pada 2021 menjadi 533 kasus dengan 1.173 tersangka, menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 29,4 triliun. Pada 2022, angka korupsi kembali naik, dengan 579 kasus, 1.396 tersangka, dan kerugian mencapai Rp 42,7 triliun. Pada tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 28,4 triliun. Korupsi menjadi masalah serius yang membutuhkan langkah pencegahan dan penanganan secara kolektif.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Upaya penanganan korupsi tidak bisa hanya bergantung pada tindakan hukum yang bersifat represif atau kuratif, tetapi memerlukan pendekatan jangka panjang melalui pendidikan untuk mencegahnya sejak dini dan menghindari dampak berkelanjutan di masa depan. Sebagai bentuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime), pemberantasan korupsi juga memerlukan langkah- langkah yang luar biasa.

Setiap warga negara harus bertanggung jawab untuk mencegah korupsi, mulai dari halhal kecil yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya pemerintah dan KPK yang bertanggung jawab untuk mencegah dan menangkal korupsi, tetapi semua orang juga bertanggung jawab untuk melakukannya. Sejak tahun 2012, surat edaran Dirjen Dikti No. 1016/E/T/2012 tentang pelaksanaan pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan tinggi telah mendukung upaya ini. Surat edaran ini kemudian diperkuat oleh Permenristekdikti No. 33 Tahun 2019. Banyak materi pendidikan telah disediakan oleh KPK untuk mendukung pelaksanaan pendidikan antikorupsi di institusi pendidikan tinggi. Di perguruan tinggi, pendidikan anti-korupsi dimasukkan ke dalam mata kuliah tertentu atau materi yang relevan.

Perguruan tinggi mulai menerapkan kebijakan pembelajaran yang menanamkan nilai antikorupsi pada siswanya sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan pentingnya pendidikan karakter. Pendekatan pembelajaran berbasis eksposisi dan narasi yang hanya menekankan penguasaan fakta dan konsep sekarang dianggap usang dan kurang relevan, menurut Winataputra (Faridli, 2011). Banyak siswa hanya belajar untuk lulus ujian dan berfokus pada pengetahuan yang tidak relevan. Akibatnya, bimbingan tes menjadi lebih populer karena dianggap memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan pembelajaran sekolah yang diatur secara formal. Kondisi ini dipengaruhi oleh standar pendidikan nasional yang tidak ada serta kualitas guru dan staf. Akibatnya, pembelajaran seringkali menjadi aktivitas rutin yang tidak menarik dan tidak mendorong siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka, termasuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Standar nasional untuk proses pembelajaran dan peningkatan kualitas tenaga kependidikan
diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan menghasilkan lulusan yang cerdas dan berkarakter.

Pendidikan adalah pilar utama pembangunan karena peran besarnya dalam mendidik orang dan mengembangkan potensi mereka. Pendidikan sangat penting di wilayah kolonial untuk menumbuhkan kesadaran politik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak, tanggung jawab, dan kewajiban mereka, dan mempersiapkan generasi pemimpin yang akan datang. Pendidikan di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai budaya, tujuan nasional, dan pandangan hidup bangsa, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dan mencakup semua lapisan anak bangsa. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter generasi muda Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, filosofi hidup, dan cita-cita bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, yaitu studi literatur. Pendekatan ini melibatkan berbagai proses, seperti mengumpulkan data dari berbagai sumber, membaca, mencatat, dan mengelola data secara sistematis, objektif, analitis, dan kritis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendidikan antikorupsi membantu membangun budaya integritas di masyarakat. Meskipun berbasis studi literatur, penelitian ini melewati tahapan persiapan yang serupa dengan pendekatan penelitian lainnya. Namun, focus proses pengumpulan data adalah pencarian dan pengolahan literatur, seperti artikel penelitian yang relevan dengan variabel yang dikaji. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

termasuk informasi dari studi sebelumnya tentang pendidikan antikorupsi, seperti buku, jurnal, artikel, situs web, dan sumber lainnya yang relevan. Tujuan analisis data ini adalah untuk memahami bagaimana pendidikan antikorupsi dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap budaya integritas. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

PEMBAHASAN

Korupsi secara harfiah diartikan sebagai "sesuatu yang rusak, jahat, dan merusak". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi didefinisikan secara lebih spesifik sebagai tindakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana milik negara, perusahaan, organisasi, yayasan, atau entitas serupa demi keuntungan pribadi atau pihak lain. Kata "korup" memiliki dua makna, yaitu: 1) buruk, rusak, busuk; dan 2) kecenderungan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, termasuk menerima sogokan atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, menurut Black's Law Dictionary, korupsi diartikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah bagi diri sendiri atau pihak lain melalui penyalahgunaan jabatan atau wewenang, yang melanggar kewajiban dan merugikan hak orang lain.

Fungsi Pendidikan Anti-Korupsi

Penerapan pendidikan anti-korupsi merupakan upaya strategis dalam menghadapi tantangan korupsi yang kian kompleks di masyarakat. Program ini dirancang untuk membentuk generasi muda yang memahami konsekuensi negatif korupsi sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas, etika, dan tanggung jawab sosial sejak usia dini. Pendekatan ini memiliki potensi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih peduli, adil, dan berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi memiliki peran krusial dalam meningkatkan kesadaran kolektif akan dampak buruk korupsi serta pentingnya menjunjung tinggi integritas dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kurikulum yang menyatu dalam pembelajaran, siswa tidak hanya diajarkan tentang bagaimana korupsi merusak struktur sosial dan ekonomi, tetapi juga diberdayakan untuk berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendekatan ini bersifat menyeluruh, mencakup penanaman nilai-nilai moral, pemahaman akan risiko korupsi, serta pengembangan kemampuan berpikir kritis untuk mengenali dan melaporkan praktik korupsi. Selain itu, pembelajaran berbasis pengalaman, seperti analisis kasus korupsi di berbagai sektor, diterapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa.

Dalam pendidikan antikorupsi, pendekatan menyeluruh mengajarkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai moral, etika, dan integritas sebagai landasan dalam setiap tindakan yang mereka ambil. Pendekatan ini juga menggunakan studi kasus nyata dan situasi dunia nyata yang berkaitan dengan korupsi, sehingga siswa dapat memahami konteks sosial serta dampak sosial-ekonomi dari praktik tersebut. Selain itu, pendekatan ini fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis, di mana siswa diajarkan untuk menganalisis situasi yang kompleks, mengidentifikasi tanda-tanda korupsi, dan merancang solusi yang inovatif. Pendekatan menyeluruh ini juga mendorong siswa untuk terlibat langsung dalam proyek sosial dan kampanye anti-korupsi, memberikan mereka pengalaman praktis dalam memerangi korupsi di masyarakat. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya mempelajari korupsi secara teori, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang aktif dan efektif. Mereka dibekali dengan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan korupsi serta keterampilan untuk

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mengambil tindakan nyata. Dengan demikian, pendekatan menyeluruh dalam pendidikan anti-korupsi menjadi dasar yang penting dalam membentuk individu yang memiliki integritas, etika, dan kemampuan untuk memberikan kontribusi positif dalam menciptakan masyarakat yang bersih dan bermartabat.

1. Peningkatan Kesadaran

Pemahaman tentang efek negatif korupsi memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang lebih etis, adil, dan berkelanjutan. Dalam situasi di mana korupsi meluas dan mengancam stabilitas sosial serta pembangunan, menyadari dampak buruk korupsi menjadi sangat penting untuk mencegah dan memberantas praktik yang merugikan ini. Kesadaran akan konsekuensi negatif korupsi membuka pemahaman masyarakat tentang kerusakan yang ditimbulkan, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial yang menghambat kemajuan berkelanjutan. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terhubung, pemahaman ini menjadi fondasi untuk mempertahankan integritas dan nilai-nilai moral. Menyadari dampak korupsi juga mengingatkan bahwa setiap tindakan korupsi memiliki akibat jangka panjang. Penyalahgunaan dana tidak hanya merusak perekonomian, tetapi juga menghalangi akses ke layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, kesadaran
ini memupuk rasa tanggung jawab sosial dan solidaritas untuk melindungi sumber daya bersama demi kesejahteraan semua..

Kemampuan untuk memotivasi perubahan perilaku menunjukkan betapa pentingnya kesadaran ini. Individu yang memahami dampak negatif korupsi lebih mungkin untuk menghindari godaan dan tindakan yang bersifat koruptif. Mereka menjaga nilai-nilai etika dan moral serta berkontribusi dalam menciptakan budaya yang menolak segala bentuk korupsi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, kesadaran ini menumbuhkan komitmen yang kuat untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Kesadaran akan dampak negatif korupsi sangat penting karena dapat mendorong perubahan perilaku. Individu yang sadar akan efek merugikan dari korupsi cenderung lebih mampu menjauhi godaan dan praktik koruptif. Mereka menjadi penjaga nilai-nilai etika dan moral, sekaligus berkontribusi dalam membangun budaya yang menolak korupsi. Kesadaran ini bukan sekadar pengetahuan semata; ia melahirkan komitmen yang kuat untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan. Lebih dari itu, pemahaman mengenai dampak buruk korupsi juga memiliki dimensi edukatif yang sangat berharga. Dalam rangka membentuk generasi yang berintegritas, kesadaran ini harus menjadi bagian tak terpisahkan dari kurikulum pendidikan. Pendidikan anti-korupsi memberi siswa wawasan yang mendalam tentang dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh tindakan korup. Dengan cara ini, para pemuda akan dipersiapkan menjadi agen perubahan yang tangguh dalam menghadapi tantangan korupsi di berbagai sektor.

Pendidikan Anti Korupsi memainkan peran vital dalam menanamkan nilai-nilai moral, integritas, dan rasa tanggung jawab di kalangan generasi muda. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahayanya korupsi sejak usia dini, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih memiliki pemahaman mendalam tentang tanggung jawab, transparansi, dan tata kelola yang baik. Upaya ini turut berkontribusi dalam membangun budaya antikorupsi di semua aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, bisnis, dan masyarakat luas. Di perguruan tinggi, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membentuk karakter mahasiswa yang tegas menolak tindakan korupsi serta membangun semangat generasi muda untuk berperan aktif dalam

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 10 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pendidikan anti-korupsi menawarkan berbagai manfaat yang signifikan dalam upaya membangun masyarakat yang lebih adil, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Berikut ini beberapa keuntungan utama dari pendidikan anti-korupsi:

1. Meningkatkan Kesadaran Publik
   Pendidikan anti-korupsi berperan penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari korupsi. Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, individu akan lebih memahami bagaimana korupsi merugikan aspek ekonomi, politik, dan sosial dalam kehidupan mereka.
2. Mengubah Pola Pikir dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat
   Melalui pendidikan anti-korupsi, pola pikir masyarakat dapat dibentuk untuk lebih mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Nilai-nilai anti-korupsi seperti kejujuran, etika, dan keadilan berpotensi menjadi bagian dari budaya masyarakat, menggantikan mentalitas permisif yang mungkin sudah mengakar terhadap korupsi.
3. Membangun Generasi yang Berintegritas
   Implementasi pendidikan anti-korupsi di sekolah dan perguruan tinggi sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berintegritas. Anak-anak dan remaja yang diajarkan nilai-nilai anti-korupsi sejak dini cenderung tumbuh menjadi individu yang menolak praktik korupsi dan mengambil tanggung jawab dalam peran public maupun pribadi mereka.
4. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan
   Ketika lebih banyak individu yang memahami dan menyadari bahaya korupsi terlibat dalam sistem pemerintahan, maka kualitas pemerintahan akan meningkat. Pejabat publik yang terdidik dalam prinsip-prinsip anti-korupsi lebih cenderung untuk bertindak sesuai dengan nilai transparansi dan akuntabilitas, sehingga berkontribusi pada terciptanya birokrasi yang bersih dan efisien.
5. Memperkuat Partisipasi Masyarakat
   Pendidikan anti-korupsi dapat menjadi dorongan bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pengawasan terhadap pemerintahan dan kebijakan publik. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang mekanisme hukum dan hak-hak mereka, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas yang efektif dalam memerangi korupsi, termasuk dengan cara memantau anggaran dan melaporkan penyimpangan.

2. Perubahan Budaya dan Keterlibatan Aktif

Pendidikan anti-korupsi memegang peranan strategis dalam mendorong perubahan budaya masyarakat, khususnya dalam menangani korupsi yang merusak struktur sosial dan ekonomi. Program ini mampu mengubah cara pandang, nilai-nilai, dan perilaku masyarakat agar menolak korupsi, sehingga dapat secara bertahap menciptakan transformasi budaya. Berikut beberapa aspek penting terkait hal ini:

1. Pemahaman dan Kesadaran
   Melalui pendidikan anti-korupsi, masyarakat dapat memahami arti korupsi, dampaknya terhadap pembangunan dan kesejahteraan, serta bagaimana korupsi dapat terjadi di berbagai bidang. Kesadaran ini membantu mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih waspada dan menolak tindakan koruptif.
2. Penguatan Nilai-Nilai Etika
   Pendidikan anti-korupsi berperan dalam menanamkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab. Dengan menanamkan nilai-nilai ini pada generasi muda, budaya integritas dapat berkembang dan menjadi norma dalam kehidupan

masyarakat.

3. Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis
   Pendidikan anti-korupsi menekankan pentingnya berpikir kritis, sehingga individu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi situasi atau kebijakan yang berpotensi memicu korupsi. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat terdorong untuk lebih aktif dalam mengawasi dan menangani praktik koruptif.
4. Mengurangi Toleransi terhadap Korupsi
   Melalui pendidikan anti-korupsi, masyarakat diajarkan untuk menolak segala bentuk korupsi, termasuk yang tampak sepele. Pendekatan ini menekankan bahwa korupsi harus dilawan tanpa kompromi, yang pada akhirnya membantu menekan praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari.
5. Keterlibatan dan Pengawasan Masyarakat
   Pendidikan anti-korupsi mendorong individu untuk secara aktif terlibat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dan lembaga publik. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat merasa lebih percaya diri untuk mempertanyakan kebijakan, menuntut akuntabilitas, dan mengawasi penggunaan dana publik dengan lebih cermat.

KESIMPULAN

Pendidikan anti-korupsi sangat penting untuk membangun masyarakat yang memiliki moralitas tinggi, integritas yang kuat, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan yang muncul dari praktik korupsi. Pendidikan anti-korupsi lebih dari sekadar memberikan informasi tentang kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik. Ini mencapai tujuan ini dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif, yang mencakup meningkatkan nilai-nilai integritas, meningkatkan kesadaran kritis tentang dampak negative korupsi, dan meningkatkan keterampilan analitis untuk menilai dan memahami masalah yang timbul akibat korupsi. Selain itu, pendidikan ini bertujuan untuk membangun karakter yang teguh dan bermoral, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip kejujuran, dan mendidik masyarakat untuk menjadi lebih sensitif dan mampu mengidentifikasi praktik korupsi yang merugikan. Selain itu, tujuan pendidikan anti-korupsi adalah untuk membekali individu dan kelompok masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi dan melawan korupsi secara konstruktif dan efektif, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun negara secara umum.

Dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi sosial, ekonomi, dan politik korupsi. Dengan mengetahui hal ini, orang diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih rasional, menghindari tindakan korup, dan bertindak dengan etika dalam kehidupan sehari- hari. Pendidikan anti-korupsi tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga keterampilan praktis untuk melihat, mengkritik, dan mengatasi situasi yang mungkin korup. Kompetensi ini membantu pemberantasan korupsi dan mengawasi dan melawannya secara lebih aktif. Akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan anti-korupsi jika pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat bekerja sama. Lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, memiliki peran penting dalam memasukkan pendidikan anti-korupsi ke dalam kurikulum dan mengajarkan nilai-nilai anti-korupsi dengan cara yang efektif. Pemerintah dapat berperan dalam menyusun kebijakan yang mendukung pendidikan anti-korupsi serta menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung program tersebut.

Meskipun demikian, masyarakat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran anti-korupsi melalui kampanye dan inisiatif yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Pendidikan anti-korupsi dapat menghasilkan perubahan budaya yang lebih mendalam dan

berkelanjutan jika dilakukan secara menyeluruh dan terorganisir. Budaya yang menolak korupsi dan mengutamakan integritas, transparansi, dan akuntabilitas akan menjadi lebih kokoh. Secara keseluruhan, pendidikan anti-korupsi tidak hanya berkontribusi pada pemberantasan korupsi, tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan anti-korupsi bukan hanya program pendidikan; itu juga merupakan dasar penting untuk membawa perubahan sosial yang positif dan membawa bangsa ke masa depan yang lebih cerah dan bebas dari korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, D. K. (2002). Education and national development: Priorities, policies, and planning (Vol. 1). Asian Development Bank Manila Philippine.

Edytya, N. P., & Annisa, A. (2019). Instilling anti-corruption spirit early on: An sociological juridical review of anti-corruption education that grows among students in the city of semarang, central java. Law Research Review Quarterly, 5(1), 25–36.

Kusuma, I. M. H. (2018). Formation of Corruption Eradication Comission. Kertha Wicaksana, 12(2), 80–89

Ninik Indawati, N. (2015). The Development Of Anti-Corruption Education (The Evaluatif Study About The Effectiveness Of Literature Study In The Study Of Anti-Corruption Education). Language, Society and Culture in Asian Context (LSCAC).

Kuntadi, C., Devi Aina, Z., Rakhmanita, G., & Handayani, W. (2022). Influence Power, Governance, and Compensation against Corruption. Sch Bull, 8(5), 160–173.

Faridli, E. M. (2011). Pengaruh Model Project Citizen dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Siswa SMA Pada Konsep Sistem Hukum dan Peradilan Nasional. Khazanah Pendidikan, 3(2). Kemendikbud, R. I. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. Kemendikbud

Othman, I. W., Mokhtar, S., & Esa, M. S. (2022). Corruption Offences Education Literacy in Preventing the Loss of National Treasures: A Review of Challenges and Concerns. International Journal of Education, Psychology and Counselling, 7(47), 639–665.

Shofiyuddin, A. (2018). Pendidikan Antikorupsi Di SMA Al-Hikmah Kebonsari Surabaya. Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam, 1(1), 34–65.

Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 13(1), 39–52

Tight, M. (1998). Education, education, education! The vision of lifelong learning in the Kennedy, Dearing and Fryer reports. Oxford Review of Education, 24(4), 473–485

Dewey, J. (1933). How we think. Lexington, MA: Heath. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2011, Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Jakarta.

Lickona, T. (2022). Character matters (Persoalan karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya. Bumi Aksara.